

PEMENUHAN HAK KONSUMEN TERKAIT JAMINAN PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PENYELENGGARA POS

ABSTRAK

Perkembangan dalam sektor perdagangan dan fenomena Covid-19 yang menyebabkan masyarakat dalam hal berbelanja kebutuhan melalui *online* yaitu dengan menggunakan *marketplace* yang salah satunya adalah *shoppe* maka diperlukan jasa pengiriman barang oleh Penyelenggara Pos. Praktisnya masih banyak terdapat kendala yang salah satunya adalah terjadi kehilangan barang konsumen. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis beberapa permasalahan mengenai pertentangan aturan mengenai pemberian jaminan ganti rugi oleh Penyelenggara Pos dan akibat yang ditimbulkan. Metode yang digunakan oleh penulis yakni Yuridis Normatif, dengan tujuan untuk menganalisis kepastian tanggung jawab Penyelenggara Pos apabila terdapat pertentangan aturan mengenai jaminan pemberian ganti rugi oleh Penyelenggara Pos dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan akibat dari penerapan pasal tersebut terkait pemenuhan hak konsumen. Penulis membahas kepastian aturan dalam pemenuhan hak jaminan ganti rugi pada praktisnya menggunakan aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, namun ditinjau dari asas-asas hukum keberlakuan yang kekuatannya lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua akibat yang ditimbulkan dari penerapan Pasal 10 ayat 2 (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos tersebut lebih merugikan konsumen dan konsumen yang harus menerima resiko apabila terjadi kerugian tersebut jika kerugian lebih besar jika tidak diasuransikan. Saran dari penulis diperlukan kepastian hukum untuk menjamin bahwa hak konsumen tersebut dapat terpenuhi dan dalam penerapan aturan diperlukan perlindungan hukum

Kata Kunci : Penyelenggara Pos, Konsumen, Ganti rugi

FULFILLMENT OF CONSUMER RIGHTS RELATED TO WARRANTIES

GRANTING OF COMPENSATION BY THE POSITOR

ABSTRACT

Developments in the trade sector and the Covid-19 phenomenon have caused people to shop for necessities online, namely by using a marketplace, one of which is shoppe, so that goods delivery services are needed by Postal Operators. Practically there are still many obstacles, one of which is the loss of consumer goods. In this study the authors want to analyze some of the problems regarding conflicting rules regarding the provision of compensation guarantees by postal operators and the resulting consequences. The method used by the author is Normative Juridical, with the aim of analyzing the certainty of postal administrator responsibility if there is a conflict of rules regarding guarantees for compensation by postal organizers in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning Implementation of Law Number 38 of 2009 concerning Post with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the consequences of implementing this article regarding the fulfillment of consumer rights. The author discusses the certainty of rules in fulfilling the right to guarantee compensation in practice using the rules of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 38 of 2009 concerning Post, but in terms of the legal principles of applicability which have a higher strength, namely the Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The two consequences arising from the application of Article 10 paragraph 2 (i) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 38 of 2009 concerning Post are more detrimental to consumers and consumers who have to accept the risk if such losses occur if the losses are greater if not insured. Suggestions from the author that legal certainty is needed to ensure that consumer rights can be fulfilled and in applying the rules, legal protection is needed

Keywords: Post Operators, Consumers, Compensation